



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU
 GUNA BARU TRANS RANGKANG TELP. (0562) 441584
 BENGKAYANG



**RENCANA KERJA
 TAHUN ANGGARAN 2026
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN 2025**



Jalan Guna Baru Trans Rangkang,
 Kelurahan Sebalu, Kecamatan
 Bengkayang,
 KABUPATEN BENGKAYANG 79212





BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6780);

11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
37. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54).

38. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

- (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
 12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 Agustus 2025


BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 1 Agustus 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
EUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 3A



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penetapannya tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diperlukan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Renja merupakan langkah awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Tahun 2026, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan program ditahun tersebut. Rencana Kerja sangat penting bagi upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah di tetapkan karena hal yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) pada dasarnya adalah indikator sasaran (Outcome) dan pada setiap kegiatan akan mendukung pencapaian sasaran atau indicator hasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2026, dibuat dan disusun sebagai pedoman kerja yang lebih terukur, terfokus, transparan dan akuntabel dalam penerapannya di Tahun 2026, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terima kasih.

Bengkayang, September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

DODY WALUYO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19790430 199712 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II.....	6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024.....	6
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1 Tujuan dan Sasaran	30
3.2 Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP.....	100



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Bengkayang tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja Perangkat Daerah (PD).

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagai Perangkat Daerah (PD) pada tahun 2026 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah (PD) yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh PD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tahun 2026, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang tahun 2026 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di Daerah



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran negara RI nomor 4421);
- g. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- i. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- j. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
- k. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;



- m. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- n. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- r. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan di Bidang Penanaman Modal;
- s. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- t. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Secara Elektronik;
- u. Keputusan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2003, tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- v. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- x. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- y. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 45);
- z. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029; dan
- aa. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan harapan dapat mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
2. Mengupayakan program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan latar belakang penyusunan Rencana Kerja PD, Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja PD, pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja PD.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi. Program diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Organisasi secara terukur, sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strategisnya. Maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dalam kurun waktu satu tahun.

BAB V PENUTUP

Memuat uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya. Seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang selama tahun 2025 dan perkiraan target tahun 2026. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, anggaran belanja DPMPPTSP Kabupaten Bengkayang setelah perubahan Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp 3.931.840.006**. Keseluruhan anggaran tersebut terbagi

dalam Belanja Operasional dan Belanja Modal dan realisasi sebagaimana tabel berikut:

**ANGGARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2024**

BELANJA		Rp	3.931.840.006
A	BELANJA OPERASIONAL	Rp	3.643.880.006
	<i>Belanja pegawai</i>	<i>Rp</i>	<i>2.520.387.036</i>
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>Rp</i>	<i>1.123.492.970</i>
B	BELANJA MODAL	Rp	287.960.000
	<i>Belanja Modal Komputer Unit</i>	<i>Rp</i>	<i>280.110.000</i>
	<i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)</i>	<i>Rp</i>	<i>7.850.000</i>
	JUMLAH	Rp	3.931.840.006

Anggaran Tahun 2024 DPMPPTSP Kabupaten Bengkayang Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar **Rp 3.931.840.006** dengan 6 program dan 12 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp 3.643.048.375** dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92,66%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2024**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 3.295.205.506	Rp 3.098.477.158	94,03
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0001.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0001.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0001.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.01.0001.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0001.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0001.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0001.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negari	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0001.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 4.432.000	Rp 2.442.800	55,12
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0002.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0002.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0003.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0003.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0004.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0004.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp -	Rp -	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.01.0006.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0006.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.01.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.432.833.746	Rp 2.323.290.742	95,50
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.399.435.746	Rp 2.291.485.642	95,50
2.18.01.2.02.0001.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 2.399.435.746	Rp 2.291.485.642	95,50
2.18.01.2.02.0001.5101	Belanja Pegawai	Rp 2.399.435.746	Rp 2.291.485.642	95,50
2.18.01.2.02.0001.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.669.096.150	Rp 1.643.632.661	98,47
2.18.01.2.02.0001.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp 1.210.469.330	Rp 1.205.927.324	99,62
2.18.01.2.02.0001.510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 1.210.469.330	Rp 1.205.927.324	99,62
2.18.01.2.02.0001.5101010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 102.099.000	Rp 101.605.810	99,52
2.18.01.2.02.0001.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 102.099.000	Rp 101.605.810	99,52
2.18.01.2.02.0001.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 102.455.490	Rp 102.010.000	99,57
2.18.01.2.02.0001.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 102.455.490	Rp 102.010.000	99,57
2.18.01.2.02.0001.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp 60.690.000	Rp 60.030.000	98,91
2.18.01.2.02.0001.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp 60.690.000	Rp 60.030.000	98,91
2.18.01.2.02.0001.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 25.703.320	Rp 25.560.000	99,44
2.18.01.2.02.0001.510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 25.703.320	Rp 25.560.000	99,44
2.18.01.2.02.0001.51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 63.766.000	Rp 63.439.920	99,49
2.18.01.2.02.0001.510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 63.766.000	Rp 63.439.920	99,49
2.18.01.2.02.0001.51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 13.555.000	Rp 2.740.972	20,22
2.18.01.2.02.0001.510101070001	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Khusus PNS	Rp 13.555.000	Rp 2.740.972	20,22
2.18.01.2.02.0001.51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 27.010	Rp 16.472	60,98
2.18.01.2.02.0001.510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 27.010	Rp 16.472	60,98
2.18.01.2.02.0001.51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp 80.389.000	Rp 72.404.541	90,07
2.18.01.2.02.0001.510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp 80.389.000	Rp 72.404.541	90,07
2.18.01.2.02.0001.51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp 2.486.000	Rp 2.474.406	99,53
2.18.01.2.02.0001.510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp 2.486.000	Rp 2.474.406	99,53
2.18.01.2.02.0001.51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp 7.456.000	Rp 7.423.216	99,56

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.02.0001.510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 7.456.000	Rp 7.423.216	99,56
2.18.01.2.02.0001.510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp 730.339.596	Rp 647.852.981	88,71
2.18.01.2.02.0001.51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp 436.996.817	Rp 420.701.009	96,27
2.18.01.2.02.0001.510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 436.996.817	Rp 420.701.009	96,27
2.18.01.2.02.0001.51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp 5.550.208	Rp 3.928.167	70,78
2.18.01.2.02.0001.510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	Rp 5.550.208	Rp 3.928.167	70,78
2.18.01.2.02.0001.51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp 287.792.571	Rp 223.223.805	77,56
2.18.01.2.02.0001.510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp 287.792.571	Rp 223.223.805	77,56
2.18.01.2.02.0001.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0001.51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0001.510103020031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 8.993.500	Rp 8.970.000	99,74
2.18.01.2.02.0004.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 8.993.500	Rp 8.970.000	99,74
2.18.01.2.02.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 8.993.500	Rp 8.970.000	99,74
2.18.01.2.02.0004.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0004.510202	Belanja Jasa	Rp 8.993.500	Rp 8.970.000	99,74
2.18.01.2.02.0004.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp 8.993.500	Rp 8.970.000	99,74
2.18.01.2.02.0004.510202010071	Belanja Lembur	Rp 8.993.500	Rp 8.970.000	99,74
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4.426.500	Rp 4.392.500	99,23
2.18.01.2.02.0005.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 4.426.500	Rp 4.392.500	99,23
2.18.01.2.02.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.426.500	Rp 4.392.500	99,23
2.18.01.2.02.0005.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0005.510202	Belanja Jasa	Rp 4.426.500	Rp 4.392.500	99,23
2.18.01.2.02.0005.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp 4.426.500	Rp 4.392.500	99,23
2.18.01.2.02.0005.510202010071	Belanja Lembur	Rp 4.426.500	Rp 4.392.500	99,23

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	Rp 19.978.000	Rp 18.442.600	92,31
2.18.01.2.02.0007.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 19.978.000	Rp 18.442.600	92,31
2.18.01.2.02.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 19.978.000	Rp 18.442.600	92,31
2.18.01.2.02.0007.510201	Belanja Barang	Rp 11.548.000	Rp 10.053.600	87,06
2.18.01.2.02.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 11.548.000	Rp 10.053.600	87,06
2.18.01.2.02.0007.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 11.548.000	Rp 10.053.600	87,06
2.18.01.2.02.0007.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0007.510202	Belanja Jasa	Rp 8.430.000	Rp 8.389.000	99,51
2.18.01.2.02.0007.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp 8.430.000	Rp 8.389.000	99,51
2.18.01.2.02.0007.510202010071	Belanja Lembur	Rp 8.430.000	Rp 8.389.000	99,51
2.18.01.2.02.0007.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0007.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.02.0007.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05.0009.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05.0009.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05.0009.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05.0009.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.05.0009.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 217.278.140	Rp 204.416.636	94,08
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 17.037.000	Rp 15.841.000	92,98
2.18.01.2.06.0001.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 17.037.000	Rp 15.841.000	92,98
2.18.01.2.06.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.037.000	Rp 15.841.000	92,98
2.18.01.2.06.0001.510201	Belanja Barang	Rp 17.037.000	Rp 15.841.000	92,98
2.18.01.2.06.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 17.037.000	Rp 15.841.000	92,98
2.18.01.2.06.0001.510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 17.037.000	Rp 15.841.000	92,98
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 35.013.000	Rp 33.485.400	95,64
2.18.01.2.06.0002.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 35.013.000	Rp 33.485.400	95,64
2.18.01.2.06.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 35.013.000	Rp 33.485.400	95,64

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.06.0002.510201	Belanja Barang	Rp 35.013.000	Rp 33.485.400	95,64
2.18.01.2.06.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 35.013.000	Rp 33.485.400	95,64
2.18.01.2.06.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 35.013.000	Rp 33.485.400	95,64
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 65.120.000	Rp 62.466.000	95,92
2.18.01.2.06.0004.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 65.120.000	Rp 62.466.000	95,92
2.18.01.2.06.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 65.120.000	Rp 62.466.000	95,92
2.18.01.2.06.0004.510201	Belanja Barang	Rp 65.120.000	Rp 62.466.000	95,92
2.18.01.2.06.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 65.120.000	Rp 62.466.000	95,92
2.18.01.2.06.0004.510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 20.000.000	Rp 18.554.000	92,77
2.18.01.2.06.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minum Rapat	Rp 38.000.000	Rp 36.800.000	96,84
2.18.01.2.06.0004.510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 7.120.000	Rp 7.112.000	99,89
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 40.936.140	Rp 38.789.750	94,76
2.18.01.2.06.0005.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 40.936.140	Rp 38.789.750	94,76
2.18.01.2.06.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 40.936.140	Rp 38.789.750	94,76
2.18.01.2.06.0005.510201	Belanja Barang	Rp 40.936.140	Rp 38.789.750	94,76
2.18.01.2.06.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 40.936.140	Rp 38.789.750	94,76
2.18.01.2.06.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 40.936.140	Rp 38.789.750	94,76
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06.0006.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06.0006.510202	Belanja Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06.0006.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06.0006.510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 59.172.000	Rp 53.834.486	90,98
2.18.01.2.06.0009.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 59.172.000	Rp 53.834.486	90,98
2.18.01.2.06.0009.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 59.172.000	Rp 53.834.486	90,98
2.18.01.2.06.0009.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 59.172.000	Rp 53.834.486	90,98
2.18.01.2.06.0009.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negari	Rp 59.172.000	Rp 53.834.486	90,98
2.18.01.2.06.0009.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 59.172.000	Rp 53.834.486	90,98
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 37.850.000	Rp 36.800.000	97,23

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 37.850.000	Rp 36.800.000	97,23
2.18.01.2.07.0010.52	BELANJA MODAL	Rp 37.850.000	Rp 36.800.000	97,23
2.18.01.2.07.0010.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 37.850.000	Rp 36.800.000	97,23
2.18.01.2.07.0010.520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 7.850.000	Rp 6.800.000	86,62
2.18.01.2.07.0010.52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp 7.850.000	Rp 6.800.000	86,62
2.18.01.2.07.0010.520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp 7.850.000	Rp 6.800.000	86,62
2.18.01.2.07.0010.520210	Belanja Modal Komputer	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00
2.18.01.2.07.0010.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00
2.18.01.2.07.0010.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000	100,00
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 487.881.170	Rp 445.805.580	91,38
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100,00
2.18.01.2.08.0001.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100,00
2.18.01.2.08.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100,00
2.18.01.2.08.0001.510201	Belanja Barang	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100,00
2.18.01.2.08.0001.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100,00
2.18.01.2.08.0001.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pas	Rp 6.900.000	Rp 6.900.000	100,00
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 59.600.000	Rp 56.063.900	94,07
2.18.01.2.08.0002.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 59.600.000	Rp 56.063.900	94,07
2.18.01.2.08.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 59.600.000	Rp 56.063.900	94,07
2.18.01.2.08.0002.510202	Belanja Jasa	Rp 59.600.000	Rp 56.063.900	94,07
2.18.01.2.08.0002.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp 59.600.000	Rp 56.063.900	94,07
2.18.01.2.08.0002.510202010059	Belanja Tagihan Telepon	Rp 14.400.000	Rp 14.191.200	98,55
2.18.01.2.08.0002.510202010060	Belanja Tagihan Air	Rp 5.200.000	Rp 1.872.700	36,01
2.18.01.2.08.0002.510202010061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	100,00
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 421.381.170	Rp 382.841.680	90,85
2.18.01.2.08.0004.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 421.381.170	Rp 382.841.680	90,85
2.18.01.2.08.0004.5101	Belanja Pegawai	Rp 120.951.290	Rp 109.344.000	90,40
2.18.01.2.08.0004.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 87.290	Rp -	0,00
2.18.01.2.08.0004.51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 87.290	Rp -	0,00
2.18.01.2.08.0004.510101080002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 87.290	Rp -	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.08.0004.510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 120.864.000	Rp 109.344.000	90,47
2.18.01.2.08.0004.51010307	Belanja Honorarium	Rp 108.984.000	Rp 97.464.000	89,43
2.18.01.2.08.0004.510103070001	Belanja Honorarium Penanggung jawaban Pengelola Keuangan	Rp 101.640.000	Rp 90.936.000	89,47
2.18.01.2.08.0004.510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang Jasa	Rp 7.344.000	Rp 6.528.000	88,89
2.18.01.2.08.0004.51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 11.880.000	Rp 11.880.000	100,00
2.18.01.2.08.0004.510103080002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp 11.880.000	Rp 11.880.000	100,00
2.18.01.2.08.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 300.429.880	Rp 273.497.680	91,04
2.18.01.2.08.0004.510202	Belanja Jasa	Rp 300.429.880	Rp 273.497.680	91,04
2.18.01.2.08.0004.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp 277.600.000	Rp 258.400.000	93,08
2.18.01.2.08.0004.510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp -	Rp -	0,00
2.18.01.2.08.0004.510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Rp 18.400.000	Rp 18.400.000	100,00
2.18.01.2.08.0004.510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 147.600.000	Rp 135.600.000	91,87
2.18.01.2.08.0004.510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 103.200.000	Rp 96.000.000	93,02
2.18.01.2.08.0004.510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 8.400.000	Rp 8.400.000	100,00
2.18.01.2.08.0004.51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp 22.829.880	Rp 15.097.680	66,13
2.18.01.2.08.0004.510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 13.801.680	Rp 13.801.680	100,00
2.18.01.2.08.0004.510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp 7.390.200	Rp 576.000	7,79
2.18.01.2.08.0004.510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 1.638.000	Rp 720.000	43,96
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 114.930.450	Rp 85.721.400	74,59
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 6.000.000	Rp 3.241.300	54,02
2.18.01.2.09.0001.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 6.000.000	Rp 3.241.300	54,02
2.18.01.2.09.0001.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6.000.000	Rp 3.241.300	54,02
2.18.01.2.09.0001.510202	Belanja Jasa	Rp 6.000.000	Rp 3.241.300	54,02
2.18.01.2.09.0001.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp 6.000.000	Rp 3.241.300	54,02
2.18.01.2.09.0001.510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 6.000.000	Rp 3.241.300	54,02
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 77.306.950	Rp 58.379.100	75,52
2.18.01.2.09.0002.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 77.306.950	Rp 58.379.100	75,52
2.18.01.2.09.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 77.306.950	Rp 58.379.100	75,52

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.01.2.09.0002.510203	Belanja Pemeliharaan	Rp 77.306.950	Rp 58.379.100	75,52
2.18.01.2.09.0002.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 77.306.950	Rp 58.379.100	75,52
2.18.01.2.09.0002.510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp 49.988.450	Rp 42.304.100	84,63
2.18.01.2.09.0002.510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 27.318.500	Rp 16.075.000	58,84
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 10.000.000	Rp 8.880.000	88,80
2.18.01.2.09.000651	BELANJA OPERASIONAL	Rp 10.000.000	Rp 8.880.000	88,80
2.18.01.2.09.00065102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.000.000	Rp 8.880.000	88,80
2.18.01.2.09.0006.510203	Belanja Pemeliharaan	Rp 10.000.000	Rp 8.880.000	88,80
2.18.01.2.09.0006.51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 10.000.000	Rp 8.880.000	88,80
2.18.01.2.09.0006.510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 3.200.000	Rp 2.800.000	87,50
2.18.01.2.09.0006.510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 6.800.000	Rp 6.080.000	89,41
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 21.623.500	Rp 15.221.000	70,39
2.18.01.2.09.0010.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 21.623.500	Rp 15.221.000	70,39
2.18.01.2.09.0010.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 21.623.500	Rp 15.221.000	70,39
2.18.01.2.09.0010.510203	Belanja Pemeliharaan	Rp 21.623.500	Rp 15.221.000	70,39
2.18.01.2.09.0010.510203003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 21.623.500	Rp 15.221.000	70,39
2.18.01.2.09.0010.5102030030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 21.623.500	Rp 15.221.000	70,39
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 82.884.000	Rp 61.745.018	74,50
2.18.02.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 28.832.000	Rp 25.085.164	87,00
2.18.02.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 28.832.000	Rp 25.085.164	87,00
2.18.02.01.0003.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 28.832.000	Rp 25.085.164	87,00
2.18.02.01.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 28.832.000	Rp 25.085.164	87,00
2.18.02.01.0003.510201	Belanja Barang	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000	100,00
2.18.02.01.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000	100,00
2.18.02.01.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.01.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.800.000	Rp 3.800.000	100,00
2.18.02.01.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 25.032.000	Rp 21.285.164	85,03

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.02.01.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 25.032.000	Rp 21.285.164	85,03
2.18.02.01.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 25.032.000	Rp 21.285.164	85,03
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 54.052.000	Rp 36.659.854	67.82
2.18.02.2.02.0003	Pengembangan data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Rp 10.584.000	Rp 3.334.400	31,50
2.18.02.2.02.0003.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 10.584.000	Rp 3.334.400	31,50
2.18.02.2.02.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 10.584.000	Rp 3.334.400	31,50
2.18.02.2.02.0003.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.510202	Belanja Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.51020208	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.510202080005	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 10.584.000	Rp 3.334.400	31,50
2.18.02.2.02.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 10.584.000	Rp 3.334.400	31,50
2.18.02.2.02.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 10.584.000	Rp 3.334.400	31,50
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 43.468.000	Rp 33.325.454	76,67
2.18.02.2.02.0004.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 43.468.000	Rp 33.325.454	76,67
2.18.02.2.02.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 43.468.000	Rp 33.325.454	76,67
2.18.02.2.02.0004.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.510202	Belanja Jasa	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.51020208	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.510202080001	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	Rp -	Rp -	0,00
2.18.02.2.02.0004.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 43.468.000	Rp 33.325.454	76,67
2.18.02.2.02.0004.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 43.468.000	Rp 33.325.454	76,67
2.18.03.2.02.0004.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 43.468.000	Rp 33.325.454	76,67
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 25.472.000	Rp 1.400.000	5,50

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25.472.000	Rp 1.400.000	5,50
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.662.000	Rp 1.400.000	12,00
2.18.03.2.01.0002.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 11.662.000	Rp 1.400.000	12,00
2.18.03.2.01.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.662.000	Rp 1.400.000	12,00
2.18.03.2.01.0002.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.51020101	Belanja Pakai Habis	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.510202	Belanja Jasa	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 11.662.000	Rp 1.400.000	12,00
2.18.03.2.01.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 11.662.000	Rp 1.400.000	12,00
2.18.03.2.01.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 11.662.000	Rp 1.400.000	12,00
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 13.810.000	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 13.810.000	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 13.810.000	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 13.810.000	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 13.810.000	Rp -	0
2.18.03.2.01.0003.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 13.810.000	Rp -	0
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 421.122.500	Rp 398.236.361	94,57
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 421.122.500	Rp 398.236.361	94,57
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.04.2.01.0005.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0005.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 364.491.500	Rp 357.682.401	98,13
2.18.04.2.01.0006.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 114.381.500	Rp 107.852.401	94,29
2.18.04.2.01.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 114.381.500	Rp 107.852.401	94,29
2.18.04.2.01.0006.510201	Belanja Barang	Rp 12.087.500	Rp 5.980.000	49,47
2.18.04.2.01.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 12.087.500	Rp 5.980.000	49,47
2.18.04.2.01.0006.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 1.200.000	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 10.887.500	Rp 5.980.000	54,93
2.18.04.2.01.0006.510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.510202	Belanja Jasa	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0006.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 102.294.000	Rp 101.872.401	99,59
2.18.04.2.01.0006.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 102.294.000	Rp 101.872.401	99,59
2.18.04.2.01.0006.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 102.294.000	Rp 101.872.401	99,59
2.18.04.2.01.0006.52	BELANJA MODAL	Rp 250.110.000	Rp 249.830.000	99,89
2.18.04.2.01.0006.5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 250.110.000	Rp 249.830.000	99,89
2.18.04.2.01.0006.520210	Belanja Modal Komputer	Rp 250.110.000	Rp 249.830.000	99,89
2.18.04.2.01.0006.52021001	Belanja Modal Komputer Unit	Rp 250.110.000	Rp 249.830.000	99,89
2.18.04.2.01.0006.520210010003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 250.110.000	Rp 249.830.000	99,89
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	Rp 11.514.000	Rp 8.725.900	75,79
2.18.04.2.01.0007.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 11.514.000	Rp 8.725.900	75,79

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.04.2.01.0007.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 11.514.000	Rp 8.725.900	75,79
2.18.04.2.01.0007.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0007.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0007.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0007.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0007.510201010052	Belanja Makanan dan Minum Rapat	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0007.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 11.514.000	Rp 8.725.900	75,79
2.18.04.2.01.0007.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 11.514.000	Rp 8.725.900	75,79
2.18.04.2.01.0007.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 11.514.000	Rp 8.725.900	75,79
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko	Rp 45.117.000	Rp 31.828.060	70,55
2.18.04.2.01.0008.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 45.117.000	Rp 31.828.060	70,55
2.18.04.2.01.0008.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 45.117.000	Rp 31.828.060	70,55
2.18.04.2.01.0008.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0008.51020101	Belanja Pakai Habis	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0008.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0008.510201010023	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp -	Rp -	0
2.18.04.2.01.0008.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 45.117.000	Rp 31.828.060	70,55
2.18.04.2.01.0008.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 45.117.000	Rp 31.828.060	70,55
2.18.04.2.01.0008.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 45.117.000	Rp 31.828.060	70,55
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 104.400.000	Rp 80.434.838	77,04
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 104.400.000	Rp 80.434.838	77,04
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp 40.961.000	Rp 27.764.284	67,78
2.18.05.2.01.0004.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 40.961.000	Rp 27.764.284	67,78
2.18.05.2.01.0004.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 40.961.000	Rp 27.764.284	67,78
2.18.05.2.01.0004.510201	Belanja Barang	Rp 3.660.000	Rp 3.660.000	100
2.18.05.2.01.0004.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 3.660.000	Rp 3.660.000	100
2.18.05.2.01.0004.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0004.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp -	Rp -	0

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.05.2.01.0004.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0004.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 3.660.000	Rp 3.660.000	100
2.18.05.2.01.0004.510202	Belanja Jasa	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0004.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0004.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0004.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 37.301.000	Rp 24.104.284	64,62
2.18.05.2.01.0004.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 37.301.000	Rp 24.104.284	64,62
2.18.05.2.01.0004.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 22.801.000	Rp 9.934.100	43,57
2.18.05.2.01.0004.510204010004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 14.500.000	Rp 14.170.184	97,73
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Rp 47.469.000	Rp 38.632.754	81,39
2.18.05.2.01.0005.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 47.469.000	Rp 38.632.754	81,39
2.18.05.2.01.0005.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 47.469.000	Rp 38.632.754	81,39
2.18.05.2.01.0005.510201	Belanja Barang	Rp 60.000	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 60.000	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 60.000	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.510202	Belanja Jasa	Rp 29.580.000	Rp 29.580.000	100
2.18.05.2.01.0005.51020201	Belanja Jasa Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0005.51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp 29.580.000	Rp 29.580.000	100
2.18.05.2.01.0005.510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp 29.580.000	Rp 29.580.000	100
2.18.05.2.01.0005.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 17.829.000	Rp 9.052.754	50,78
2.18.05.2.01.0005.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 17.829.000	Rp 9.052.754	50,78
2.18.05.2.01.0005.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 17.829.000	Rp 9.052.754	50,78
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Rp 15.970.000	Rp 14.037.800	87,90
2.18.05.2.01.0006.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 15.970.000	Rp 14.037.800	87,90
2.18.05.2.01.0006.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 15.970.000	Rp 14.037.800	87,90
2.18.05.2.01.0006.510201	Belanja Barang	Rp 2.705.000	Rp 2.705.000	100

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
2.18.05.2.01.0006.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 2.705.000	Rp 2.705.000	100
2.18.05.2.01.0006.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0006.510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp -	Rp -	0
2.18.05.2.01.0006.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 2.705.000	Rp 2.705.000	100
2.18.05.2.01.0006.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 13.265.000	Rp 11.332.800	85,43
2.18.05.2.01.0006.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 13.265.000	Rp 11.332.800	85,43
2.18.05.2.01.0006.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 13.265.000	Rp 11.332.800	85,43
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01.0002.51	BELANJA OPERASIONAL	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01.0002.5102	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01.0002.510201	Belanja Barang	Rp -	Rp -	0
2.18.06.2.01.0002.51020101	Belanja Barang Pakai Habis	Rp -	Rp -	0
2.18.06.2.01.0002.510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	0
2.18.06.2.01.0002.510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp -	Rp -	0
2.18.06.2.01.0002.510204	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01.0002.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
2.18.06.2.01.0002.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 2.756.000	Rp 2.755.000	99,96
	BELANJA PEGAWAI	Rp 13.434.622.764	Rp 12.743.905.960	94,86
	BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 28.137.950.542	Rp 26.030.316.442	92,51
	BELANJA MODAL	Rp 7.304.533.340	Rp 6.353.096.132	86,97
	BELANJA DAERAH OPD DPMPTSP TA. 2024	Rp 3.931.840.006	Rp 3.643.048.375	92,66

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 diperoleh hasil capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Bengkayang sebesar 92,66%. Dengan capaian kinerja sebesar 92,66%. tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dapat dikategorikan sebagai instansi yang cukup berhasil dalam pencapaian kerjanya.

Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2025

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2025 yang sedang berjalan dengan anggaran Belanja Sebesar **Rp 3.955.605.532** terdiri dari 6 program, 13 kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan diharapkan Pencapaian Kinerja keberhasilan mencapai 100% atau minimal sama dengan Tahun 2024.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:

1. Validitas data dan informasi belum maksimal;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber Daya Manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
3. Belum optimalnya koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dengan Dinas dan Instansi terkait;
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal serta Perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list ke working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang yang membantu Bupati Bengkayang, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, dan atas perubahan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang proses pelayanan perizinan dimulai dari penerimaan berkas sampai dengan penyerahan SK izin kepada pemohon harus sesuai dengan standar waktu seperti yang telah ditentukan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
Perizinan				
1.	Izin Gangguan	0	0	0
2.	Izin Layak Hygine Sanitasi	5	5	100
3.	Izin Pengelolaan Limbah Cair	5	5	100
4.	Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi Ke Tanah	5	5	100
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	5	5	100
6.	Izin Pengumpulan Limbah B3	5	5	100
7.	Izin Lingkungan	5	5	100
8.	Izin Daur Ulang / Pengolahan Sampah	7	7	100
9.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	5	5	100
10.	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman	5	5	100
11.	Izin Mendirikan Bangunan	7	7	100

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
12.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	5	5	100
13.	Izin Lalu Lintas Angkutan Jalan	5	5	100
14.	Izin Pelayaran	5	5	100
15.	Izin Pendirian Rumah / Klinik Bersalin	5	5	100
16.	Izin Balai Pengobatan	5	5	100
17.	Izin Pendirian Rumah Sakit	5	5	100
18.	Izin Pendirian Puskesmas	5	5	100
19.	Izin Apotik	5	5	100
20.	Izin Optik	5	5	100
21.	Izin Pengobatan Tradisional	5	5	100
22.	Izin Praktek Fisioterapi	3	3	100
23.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	5	5	100
24.	Izin Toko Obat	5	5	100
25.	Izin Tukang Gigi	5	5	100
26.	Izin Praktek Dokter	5	5	100
27.	Izin Praktek Dokter Gigi	5	5	100
28.	Izin Praktek Dokter Spesialis	5	5	100
29.	Izin Praktek Bidan	5	5	100
30.	Izin Kerja Bidan	5	5	100
31.	Izin Praktek Perawat	5	5	100
32.	Izin Kerja Perawat	5	5	100
33.	Izin Praktek Perawat Gigi	5	5	100
34.	Izin Praktek Apoteker	5	5	100
35.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kesehatan	5	5	100
36.	Izin Kerja Apoteker	5	5	100

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
37.	Izin Praktek Asisten Apoteker	5	5	100
38.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	5	5	100
39.	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Minuman Beralkohol	5	5	100
40.	Izin Usaha Toko Modern	5	5	100
41.	Izin Pengelolaan Pasar Tradisional	5	5	100
42.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	5	5	100
43.	Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman	5	5	100
44.	Izin Usaha Penggilingan Padi (Huler)	5	5	100
45.	Izin Kios Sarana Produksi	5	5	100
46.	Izin Usaha Industri	7	7	100
47.	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi	3	3	100
48.	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan	3	3	100
49.	Izin Usaha Hotel dan Penginapan	3	3	100
50.	Izin Usaha Kepariwisataaan	3	3	100
51.	Izin Usaha Perjalanan Wisata	3	3	100
52.	Izin Prinsip Penanaman Modal	7	7	100
53.	Izin Usaha Penanaman Modal	3	3	100
54.	Izin Lokasi	14	14	100
55.	Izin Perpanjangan Lokasi	5	5	100
56.	Izin Usaha Perkebunan	7	7	100
57.	Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B)	7	7	100
58.	Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)	7	7	100
59.	Izin Perubahan Luas Lahan	7	7	100
60.	Izin Perubahan Luas Lahan melalui Perluasan Pengurangan	7	7	100
61.	Izin Jenis Tanaman	5	5	100
62.	Izin Diversifikasi Usaha	5	5	100
63.	Izin Usaha Pertanian	5	5	100
64.	Izin Usaha Produktifitas Benih	5	5	100
65.	Izin Produksi Bibit Ternak	5	5	100
66.	Izin Usaha Pakan Ternak	5	5	100

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
67.	Izin Fasilitas Rumah Hewan	5	5	100
68.	Izin Rumah Sakit Hewan	7	7	100
69.	Izin Rumah Potong Hewan	7	7	100
70.	Izin Usaha Pengedar Obat Hewan	5	5	100
71.	Izin Praktek Dokter Hewan	5	5	100
72.	Izin Pengolahan Ikan	7	7	100
73.	Izin Pengumpul dan Pemasaran Hasil Perikanan	7	7	100
74.	Izin Pembudidayaan Ikan	7	7	100
75.	Izin Kapal Pengangkutan Ikan	7	7	100
76.	Izin Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas	7	7	100
77.	Izin Panas Bumi	7	7	100
78.	Izin Sektor Ketanagalistrikan (PU)	7	7	100
79.	Izin Minyak dan Gas Bumi	7	7	100
80.	Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	5	5	100
81.	Izin Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	5	5	100
82.	Izin Penempatan / Penyaluran Tenaga Kerja Swasta	5	5	100
Non Perizinan				
1.	Informasi Lahan	5	5	100
2.	Rekomendasi Hak guna Usaha (HGU)	7	7	100
3.	Izin Survey	3	3	100
4.	Izin Perubahan Penggunaan Tanah	5	5	100
5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	3	100
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3	3	100
7.	Tanda Daftar Industri (TDI)	3	3	100
8.	Izin Reklame / Iklan	5	5	100
9.	Tanda Daftar Usaha Peternakan	3	3	100
10.	Tanda Daftar Budi Daya Perkebunan	3	3	100
11.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3	3	100
12.	Surat Tanda Daftar Waralaba	3	3	100
13.	Rekmendasi Penerbitan PKAPT Perdagangan Kayu atau Pulau	5	5	100

NO.	JENIS PELAYANAN	STANDAR WAKTU PENYELESAIAN (HARI KERJA)	RATA RATA PENYELESAIAN (HARI KERJA)	TINGKAT KESESUAIAN %
14.	Rekomendasi Pembangunan SPBU	5	5	100
15.	Sertifikat Laik Bangunan Gedung	5	5	100
16.	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung	3	3	100
17.	Izin Pendidikan Formal Non Formal	5	5	100
18.	Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3	3	100
19.	Tanda Daftar Penempatan / Penyalur Tenaga Kerja Swasta	3	3	100
20.	Izin Penelitian /Research	3	3	100
21.	Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL)	3	3	100
22.	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	3	100

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bengkayang mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
1	Tingginya Target Realisasi Penanaman Modal yang Ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 – 2026.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkayang sudah berupaya berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kabupaten Bengkayang terkait Rencana Melakukan Revisi Target Realisasi Investasi Kabupaten Bengkayang pada RPJMD Tahun 2021 - 2026, tetapi Revisi tidak dapat dilakukan dikarenakan Tahun 2025 Kabupaten Bengkayang sudah harus menyusun RPJMD yang baru Tahun 2025 - 2029
2	Ketidakpatuhan dan Ketidaktahuan Pelaku Usaha dalam Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya (LKPM) Per Triwulan dan Semester Sehingga Mempengaruhi Target	Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkayang sudah berupaya menyurati para Pelaku Usaha agar dapat melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya per Triwulan dan Semester dan melakukan pengawasan di lapangan serta melakukan Sosialisasi/Bimtek pada Pelaku Usaha

NO	PERMASALAHAN	UPAYA PENYELESAIAN
	Realisasi Investasi di Kabupaten Bengkayang.	
3	Kualitas SDM yang belum memadai	Mengikutsertakan SDM yang ada untuk mengikuti Bimbingan Teknis dan berupaya melaksanakan perekrutan SDM Penata Perizinan dan Penata Kelola Penanaman Modal melalui pengajuan formasi berdasarkan kebutuhan SKPD
4	Masyarakat belum paham atau gagap teknologi dalam mengakses pelayanan online OSS dan jaringan internet masih lambat di dalam perdesaan	Melaksanakan pelayanan perizinan sebagai berikut: a. Pelayanan Berbantuan; b. Sosialisasi; c. Pelayanan Keliling dengan jadwal yang telah ditetapkan di wilayah kecamatan; d. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)
5	Jangkauan internet yang belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Bengkayang	Penyelenggaraan pelayanan keliling mengarahkan titik lokasi yang mudah diakses internet (dekat dengan lokasi pemohon atau pelaku usaha)

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Agar visi dan misi dapat dilaksanakan secara terorganisasi dan terencana maka perlu ada alur kerja yang jelas dan terprogram yang dilaksanakan, Misi pembangunan Kabupaten Bengkayang untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah **Misi 2 (Kedua) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, dan akuntabel** dan **Misi 4 (Empat) Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif**. Ini merupakan acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dalam merumuskan **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** sesuai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan yang akan mendukung **Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati**.

Dalam rangka mewujudkan **Misi Kedua** dan **Misi Keempat**, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang memiliki **Perencanaan Strategik**, diantaranya:

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL.
2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL.
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.
4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.
5. PROGRAM PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.
6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya penetapan tujuan. Penetapan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Menerapkan Pelayanan Publik, Sistem Informasi Terpadu dan Penjamin Mutu Yang Berkualitas dan Efisien” dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang merupakan fungsi/bidang kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang. Tujuannya adalah “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Potensi Sumber Daya Alam daerah”.

Berdasarkan pernyataan tujuan diatas serta pernyataan visi dan ditetapkanlah tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang untuk waktu 1-5 tahun yang akan datang adalah “Meningkatnya pertumbuhan dan Daya Saing Sektor Ekonomi Potensial Daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif”.

Adapun Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Kerja yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Dari tujuan diatas maka sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah.
2. Optimaliasasi Nilai Realisasi PMDN.
3. Meningkatnya Rasio Daya serap Tenaga Kerja.
4. Meningkatnya Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA).
5. Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA).

Berdasarkan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah ditetapkan dalam strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Visi RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yaitu;

***“KABUPATEN BENGKAYANG YANG MAJU, MANDIRI,
SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN”***

Visi tersebut memiliki substansi nilai (value) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam misi pembangunan. Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Maju, Bengkayang yang maju diartikan sebagai daerah yang memiliki kemajuan di sisi ekonomi dan sisi sosial.

Mandiri, Bengkayang yang mandiri diartikan sebagai keadaan daerah yang tercermin pada ketahanan ekonomi, keberdayaan masyarakat yang dilandasi oleh ketahanan dan modal sosial.

Sejahtera, Bengkayang yang sejahtera diartikan bahwa masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tercermin ketika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar sandang, papan, dan pangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta memiliki pendapatan yang memenuhi standar kebutuhan hidup.

Berkelanjutan, pembangunan Bengkayang yang berkelanjutan diartikan bahwa pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang.

Adapun kebijakan dapat diartikan sebagai ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, serta visi dan misi instansi Pemerintah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Kebijakan satuan kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan (umum) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan prosedur perijinan yang memudahkan pelayanan publik.
2. Mengembangkan prosedur perizinan penanaman modal dan pembinaan investasi yang memudahkan investor/perusahaan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasarnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsinya, maka program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 akan dilaksanakan beberapa program dan kegiatan.

3.2 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 dan Rencana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

Program Utama

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 2. Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 3. Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
- b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 2. Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
 3. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. **Program Promosi Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
 2. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 2. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
 3. Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
 4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
 2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

3. Pengawasan Penanaman Modal
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman modal**, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Evaluasi Kinerja serta akuntabilitas keuangan dan pencapaian kinerja organisasi.
2. ***Administrasi Keuangan***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Gaji dan tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan sumber daya aparatur yang handal dan pencapaian kinerja organisasi
4. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan menyiapkan Kebutuhan sarana dan prasarana Kantor.
5. ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Pengadaan Barang serta meningkatkan kebutuhan peralatan sarana dan prasarana Kantor.
6. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir Jasa Operasional Kantor diantaranya air, listrik dan internet
7. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk Jasa Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor, peralatan jasa Kendaraan Dinas Operasional serta jasa pemeliharaan peralatan lainnya.
8. ***Penataan Organisasi***
Sub Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang akurat dan terkoordinasi, sebagai bentuk akuntabilitas serta bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan daerah.

Uraian Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut (terlampir):

Tabel 3.1 URAIAN KEGIATAN PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.702.316.712		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.952.316.712		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.54	85.75	3.952.316.712	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2.000.000		
2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	2.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.000.000		
2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	2.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1	2.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2.000.000		
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	2.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2.000.000		
2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2.000.000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	20.000.000		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3	20.000.000		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.349.356.712		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	3.000.000		
2.18.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	3.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	3.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	10.000.000		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	1	10.000.000		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	3.000.000		
2.18.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	3.000.000		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	128.040.000		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				128.040.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	128.040.000		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	37	3.202.316.712		
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.202.316.712		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	37	3.202.316.712		
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	10.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	10.000.000		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	37	10.000.000		
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				10.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	37	10.000.000		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				164.640.000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	5	9.640.000		
2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.640.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	5	9.640.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	205	40.000.000		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				40.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	205	40.000.000		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	6500	25.000.000		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	6500	25.000.000		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10	10.000.000		
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10	10.000.000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	44	40.000.000		
2.18.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	44	40.000.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	24	40.000.000		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	24	40.000.000		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3	30.000.000		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	3	30.000.000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	12	35.000.000		
2.18.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	12	35.000.000		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.320.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		208.320.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				208.320.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4		208.320.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	12	12.000.000		
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	12	12.000.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	20	10.000.000		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	20	10.000.000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	350	3.000.000		
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	350	3.000.000		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95	10	10.000.000		
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95	10	10.000.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	25.000.000		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	3	25.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	20.000.000		
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1	20.000.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	12	25.000.000		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	12	25.000.000		
2.18.01.2.13 - Penataan Organisasi				10.000.000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	4	10.000.000		
2.18.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				10.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	4	10.000.000		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				240.000.000		
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	3	3.09	240.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	1	40.000.000		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				40.000.000		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	1	40.000.000		
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	30.000.000		
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				30.000.000		
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	1	30.000.000		
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2	1	10.000.000		
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				10.000.000		
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2	1	10.000.000		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				160.000.000		
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1	1	40.000.000		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				40.000.000		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1	1	40.000.000		
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	120.000.000		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				120.000.000		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1	1	120.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	0	-		
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				-		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	0	-		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				60.000.000		
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	75	76	60.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000		
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000		
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	1	30.000.000		
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	1	30.000.000		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	1	30.000.000		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				300.000.000		
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	85	86	300.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				300.000.000		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	50.000.000		
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				50.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	1	50.000.000		
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500	900	50.000.000		
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	500	900	50.000.000		
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		120	50.000.000		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				50.000.000		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		120	50.000.000		
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500	900	150.000.000		
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				150.000.000		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	500	900	150.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				100.000.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	72.37	73	100.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000		
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50	50	55.000.000		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				55.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50	50	55.000.000		
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	10	25.000.000		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				25.000.000		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10	10	25.000.000		
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	5	20.000.000		
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				20.000.000		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	5	20.000.000		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			TARGET	PAGU		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				50.000.000		
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	85	86	50.000.000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000		
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	50.000.000		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				50.000.000		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	4	50.000.000		



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sedangkan PAD dialokasikan untuk anggaran program kegiatan dan program urusan penunjang perangkat daerah.

Sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.702.316.712,00								4.840.374.629,80	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.702.316.712,00								4.840.374.629,80	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.702.316.712,00								4.840.374.629,80	
1,	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-			65.5 Nilai	3.952.316.712,00						-	4.051.124.629,80		
		[Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah]	Nilai AKIP Perangkat Daerah	89	85.54	85.70	85.75	3.952.316.712,00	-	-	-	-	-	-	4.051.124.629,80	-	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			11 Dokumen	30.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMP TSP	-	30.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokum en	20.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPPTSP		20.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Dokum en	2.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPPTSP		2.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokum en	2.0 00.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		2.0 50.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokum en	2.0 00.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		2.0 50.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				2 Dokum en	00.000,00	2.0	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkua t Fondasi P erekonomia n Kalimantana n Barat yang Inklusif dan Berkelanjut an PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG BERDAYA SAING DAN BERI NOVASI	DPMPTSP		50.000,00	2.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				2 Lapora n	2.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		2.050.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			5 Dokum en	3.349.356.712,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	3.433.090.629,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				37 Orang/bulan	3.202.316.712,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		3.282.374.629,80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				1 Dokumen	128.040.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		131.241.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				1 Dokum en	00.000,00	3.0	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	75.000,00	3.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Lapora n	00.000,00	3.0	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	75.000,00	3.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPPTSP		3.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPPTSP		10.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			42 Orang	20.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembang kan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	20. 500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				37 Paket	10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		250.000,00	10.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				5 Orang	10.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		10.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administarsi Umum Perangkat Daerah	-			29 Dokum en 65259 Paket	164.640.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	168.756.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	10.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		250.000,00	10.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				44 Paket	40.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		41.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				205 Paket	40.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		41. 000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				65000 Paket	25.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		25. 625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>				5 Dokum en	9.640.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		9.881.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	40.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		41.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			15 Unit	65.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	625.000,00	66.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	30.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		750.000,00	30.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	35.000.000,00	Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa Kab. Bengkayang, Bengkayang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		35.875.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			394 Laporan	233.320.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	239.153.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				350 Lapora n	3.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		3.075.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 BULAN Lapora n	208.320.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		213.528.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				20 Lapora n	10.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		10. 250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Lapora n	12.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		12. 300.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			3 7 Unit	80.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembang kan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	82. 000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 2 Unit	20.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		20. 500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 2 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		25. 625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 0 Unit	10.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		10. 250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	25.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		25.625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi	<i>Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan publik</i>	-			120 Orang	10.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP	-	10. 250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i>				4 Dokum en	10.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	DPMPTSP		10.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2,	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	<i>Realisasi Total terhadap Target Investasi</i>	-			3.09 %	240.000.000,00						-	266.500.000,00	
		[Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi]	Realisasi Total terhadap Target Investasi	5	3	3	3.09	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	266.500.000,00	-
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insenti f dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	-			3 Dokum en	80.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha	-	82.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		750.000,00	30.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah</i>				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		41. 000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</i>				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		10.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	-			3 Dokum en	160.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha	-	184.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		500.000,00	20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				1 Daerah	40.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		41.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		123.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3,	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi</i>	-			76 %	60.000.000,00						-	61.500.000,00	
		[Meningkatkan Jangkauan Promosi Penanaman Modal]	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	80	75	75	76	60.000.000,00	-	-	-	-	-	-	61.500.000,00	-
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	-			2 Dokum en	60.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	masyarakat dan Pelaku usaha	-	61.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	masyarakat dan Pelaku usaha		30.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				1 Dokum en	30.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	masyarakat dan Pelaku usaha		30.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4,	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	-			86 %	300.000.000,00						-	307.500.000,00	
		[Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko]	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	90	85	85	86	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	307.500.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-			1920 Pelaku Usaha	300.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Pelaku usaha	-	307.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Pelaku usaha		51.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				900 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Pelaku usaha		153.750.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				120 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Pelaku usaha		51.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				900 Kegiatan Usaha	50.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembang kan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Pelaku usaha		51.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5,	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha</i>	-			73 %	100.000.000,00						-	102.500.000,00	
		[Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal]	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	77	72.37	73	73	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	102.500.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-			65 Pelaku Usaha	100.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha	-	102.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				5 Kegiatan Usaha.	20.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		500.000,00	20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				10 Kegiatan Usaha	25.000.000,00	Kab. Bengkaya ng, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengemban gkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatka n nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHA N DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		25. 625.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6,	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal</i>	-			4 Doku men	50.000.000,00						-	51. 250.000,00	
		[Meningkatkan Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	90	85	86	86	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	51. 250.000,00	-



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	50.000.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha	-	250.000,00	51.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik															



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Ditolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Bengkayang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI SERTA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH	Masyarakat dan Pelaku usaha		51.250.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JUMLAH								4.702.316.712,00							4.840.374.629,80	

Bengkayang, September 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG**



DODY WALUYO, S.STP., M.Si

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 agar lebih terfokus sesuai dengan program prioritas.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (RENJA) Bengkayang Tahun 2026, kaidah-kaidah pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang dengan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Pejabat Fungsional Ahli muda serta Pejabat Pengawas beserta staf yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang;
- (2) Seluruh Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang agar melaksanakan program-

- program Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang 2026 dengan sebaik-baiknya;
- (3) Setiap Pejabat dan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang agar mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026.
 - (4) Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 merupakan dasar penyusunan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026;
 - (5) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Anggaran PD (RKA-PD);
 - (6) Dalam pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil;

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026, Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang. Rencana Kerja (RENJA) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkayang Tahun 2026 ini disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana kerja (RENJA) memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Bengkayang, September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

DODY WALUYO, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19790430 199712 1 001



DPMPD
KABUPATEN BENGKAYANG

